



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

RENCANA AKSI

2024

GOVWU

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEUTANAN
WILAYAH MALUKU PAPUA



KATA PENGANTAR

Rencana Aksi ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua pada Tahun 2024.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlandaskan Rencana kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 maka Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua menyusun Rencana Aksi yang memuat perencanaan dan prognosis per bulan dan per triwulan guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan penyusunan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam peningkatan efisien, efektifitas dan produktifitas pada tahun 2024.



Plt. Kepala Balai,

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si

NIP. 19750610 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Aksi Tahun 2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua adalah dokumen rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama tercapainya sasaran pada Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung terkait dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2024 maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan program prioritas nasional yang telah ditetapkan.

I.I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan pedoman pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua.

Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah untuk mengimplementasikan kegiatan lingkup Unit Pelaksana Teknis sehingga target yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dapat tercapai.

Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua sebagai salah satu Unit pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

I.II. LANDASAN HUKUM

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada

1. Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri LHK Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263 /MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
5. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024.

BAB II

RENCANA AKSI

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 mempunyai sasaran program kegiatan seperti tabel berikut ini :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	10 Operasi
	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	8 Operasi
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	1 Perkara
Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	26 Badan Usaha
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	13 Perkara
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	93,65 Poin

BAB III

PENUTUP

Untuk mencapai sasaran program sesuai Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua berharap pada kontribusi dari Seksi Wilayah Kerja, baik Seksi Wilayah I Manokwari, Seksi Wilayah II Ambon Serta Seksi Wilayah III Jayapura. Kontribusi yang besar dari tiap Seksi Wilayah Kerja diharapkan mampu untuk meminimalisir gangguan, ancaman dan pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini disusun dan digunakan sebagai bahan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua serta hasil pelaksanaan kegiatan akan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Dengan disusunnya rencana aksi ini diharapkan menjadi pedoman agar setiap Sumber Daya Manusia yang ada pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua dapat bekerja keras dan bersungguh-sungguh sehingga tujuan program dari Balai, Direktorat Jenderal maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat tercapai.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA AKSI
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	Anggaran/Pagu (Rp)	Satuan Output / Komponen	Target Output / Komponen	Target Per Triwulan			
						TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1 Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	1	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup – Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan – Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	4.054.288.000	Operasi	10	-	3	7	10
	2	Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar – Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal – Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan – Operasi Pembalakan Liar – Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	3.680.360.000	Operasi	8	-	3	6	8
	3	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	Orang	15	-	5	12	15
2 Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	1	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan – Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH – Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat – Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	320.000.000	Perkara	1	-	-	-	1
3 Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	1	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK – Penanganan Pengaduan Perusahaan – Penanganan Pengaduan Non Perusahaan – Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.362.160.000	Badan Usaha	26	4	12	22	26
4 Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	1	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap – Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK – Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK – Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK – Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK – Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	5.081.760.000	Perkara	13	2	5	9	13
5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien Ditjen Gakkum LHK	1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) – Layanan Umum – Layanan Perkantoran – Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37.718.000.000	Point	93,65	14,10	28,20	60,92	93,65

Manokwari, Januari 2024
 Kepala Balai

 Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19750610 200003 1 002

**MATRIKS RENCANA AKSI TERHADAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PPHLHK WILAYAH MALUKU PAPUA**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Uraian	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target	Anggaran	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Prop. Papua Barat dan Papua Barat Daya	Prop. Papua Barat dan Papua Barat Daya	Prop. Papua Barat dan Papua Barat Daya	4 Kegiatan	254.114.000	10 Operasi
				Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	3 Kegiatan	190.584.000	
				Prop. Maluku dan Maluku Utara	Prop. Maluku dan Maluku Utara	Di. Prop. Maluku dan Maluku Utara	3 Kegiatan	190.590.000	
				Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	15 Kegiatan	900.000.000	
			Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	178.212.000	
				Wasior	Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	178.212.000	
				Anggi	Papua Barat	Kab. Pegaf	1 Operasi	178.212.000	
				Tobelo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1 Operasi	178.212.000	
				Namlea	Maluku	Buru	1 Operasi	178.212.000	
				Bula	Maluku	Seram Bagian Timur	1 Operasi	178.212.000	
				Merauke	Papua Selatan	Merauke	1 Operasi	178.212.000	
				Burmeson	Papua	Mamberamo Raya	1 Operasi	178.212.000	
				Nabire	Papua Tengah	Nabire	1 Operasi	178.212.000	
Pulau Batanta	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	1 Operasi	224.112.000					

		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal					8 Operasi	
		Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Prop. Papua dan Papua Barat Daya	Prop. Papua dan Papua Barat Daya	Di Prop. Papua dan Papua Barat Daya	6 Kegiatan	234.468.000	
	Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan		Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	Prop. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	6 Kegiatan	219.468.000	
			Prop. Maluku dan Maluku Utara	Prop. Maluku dan Maluku Utara	Di. Prop. Maluku dan Maluku Utara	6 Kegiatan	219.468.000	
			Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	9 Kegiatan	482.388.000	
	Operasi Pembalakan Liar		Bintuni	Papua Barat	Bintuni	1 Operasi	118.818.000	
			Bula	Maluku	Seram Bagian Timur	1 Operasi	117.532.000	
			Merauke	Papua Selatan	Merauke	1 Operasi	119.868.000	
			Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	2 Operasi	254.700.000	
	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar		Sorong	Papua Barat Daya	Sorong	1 Operasi	133.680.000	
			Ambon	Maluku	Ambon	1 Operasi	133.680.000	
			Jayapura	Papua	Jayapura	1 Operasi	138.280.000	
			Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	Maluku dan Papua	3 Operasi	400.800.000	
	Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya						15 Orang	
		Peningkatan Kapasitas Polhut	Manokwari	Papua Barat	Kab. Manokwari	5 Orang	66.000.000	
				Ambon	Maluku	Kota Ambon	5 Orang	66.000.000
				Jayapura	Papua	Kota Jayapura	5 Orang	68.000.000
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara LH	Sengketa Hidup yang Ditangani					1 Perkara	
		Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	Salawati	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	1 Kegiatan	120.000.000	
		Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	Salawati	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	1 Kegiatan	50.000.000	
		Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan,	Salawati	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	1 Kegiatan	150.000.000	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Uraian	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target	Anggaran	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha/Kegiatan Terhadap ketaatan Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang undangan Terkait bidang LHK	Pengawasan ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha	Penanganan Pengaduan Perusahaan 5	Meyah	Papua Barat	Kab. Tambrau	1 Badan Usaha	50.800.000	26 Badan Usaha
				Koya	Papua	Kab. Keerom	1 Badan Usaha	50.800.000	
				Sarmi	Papua	Kab. Sarmi	1 Badan Usaha	50.800.000	
				Weda	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	50.800.000	
				Catubow	Papua Barat	Kab. Pegaf	1 Badan Usaha	50.800.000	
			Penanganan Pengaduan Non Perusahaan 5	Bintuni	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Badan Usaha	46.080.000	
				Bula	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	46.080.000	
				Wasior	Papua Barat	Kab. Teluk Wondam	1 Badan Usaha	46.080.000	
				Kaiman	Papua Barat	Kab. Kaimana	1 Badan Usaha	46.080.000	
				Tanah Merah	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	46.080.000	
			Pengawasan Bidang LHK 16	NN	Papua Barat	Manokwari	1 Badan Usaha	41.957.000	
				NN	Papua Barat	Bintuni	1 Badan Usaha	41.957.000	
				NN	Papua Barat	Wasior	1 Badan Usaha	41.957.000	
				NN	Papua Barat	Kaimana	1 Badan Usaha	41.957.000	
				NN	Papua Barat	Pegunungan Arfak	1 Badan Usaha	41.960.000	
				NN	Papua Barat	Sorong	1 Badan Usaha	41.957.000	
				NN	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	44.171.000	
				NN	Papua	Kab. Mimika	1 Badan Usaha	44.171.000	
				NN	Papua	Kota Jayapura	1 Badan Usaha	44.171.000	
				NN	Papua	Kab. Biak	1 Badan Usaha	44.171.000	
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesainya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai Dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak	Manokwari	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	3 Kegiatan	465.700.000	13 Perkara
				Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	4 Kegiatan	514.950.000	
				Bula	Maluku	Kab. Seram	4 Kegiatan	522.940.000	
				Jayapura	Papua	Kab. Jayapura	4 Kegiatan	522.940.000	
			Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Manokwari	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	3 Perkara	465.238.000	
				Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	3 Perkara	329.814.000	
				Bula	Maluku	Kab. Seram	3 Perkara	329.814.000	
				Jayapura	Papua	Kab. Jayapura	3 Perkara	329.814.000	
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Point	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Manokwari	Papua Barat	Kab. Manokwari		93,65 Point	
				Sorong	Papua Barat Daya	Kota. Sorong			
				Ambon	Maluku	Kota. Ambon			
				Ternate	Maluku Utara	Kab. Halmahera			
				Jayapura	Papua	Kota Jayapura			
				Merauke	Papua Selatan	Kab. Merauke			
				Nabire	Papua Tengah	Kab. Nabire			

PROGNOSIS CAPAIAN KEGIATAN PERBULAN BPPHLHK WIL. MALUKU DAN PAPUA T.A.2024

Indikator Kinerja Program	Bulan ke-*												Satuan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan				1	1	1	2	1	1	1	2		Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal				1	1	1	1	1	1	1	1		Operasi
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan					2	2	2	2	2	2	3		Orang
Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani												1	Perkara
Penanganan Pengaduan Perusahaan 5			1		1		1	1	1				Perusahaan
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan 5				1			1	1		2			Perusahaan
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			3	2	2	2	2	2		2			Perusahaan
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK P21			2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	Perkara
Layanan Umum	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Layanan
Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal							0,1	0,1	0,1	0,35	0,3	0,05	Layanan